

Lampiran I

Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 15/ 4 /DPNP Tanggal 6 Maret 2013

Perihal: Kepemilikan Saham Bank Umum

**DOKUMEN ADMINISTRASI TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM BANK
OLEH BADAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN BANK PADA SAAT
MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MEMILIKI SAHAM BANK LEBIH
DARI 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

No.	Dokumen*)
1	Surat Keterangan dari Otoritas Pengawasan Bank mengenai: a. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir; b. Hasil penilaian pemenuhan kewajiban modal minimum Bank sesuai profil risiko posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir; c. Jumlah modal inti (<i>tier 1</i>) Bank posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir
2	Surat pernyataan bahwa calon PSP akan membuat surat komitmen membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki pada saat akan meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi di atas 40%.
3	Surat keterangan dari Otoritas Pasar Modal bahwa calon PSP berupa lembaga keuangan bank merupakan perusahaan <i>go public</i> .

*) Disampaikan pada saat permohonan memiliki saham bank saham sebesar 40% dari modal Bank

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR

Lampiran II

Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 15/4/DPNP Tanggal 6 Maret 2013

Perihal: Kepemilikan Saham Bank Umum

**DOKUMEN ADMINISTRASI TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM BANK
OLEH BADAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN BANK PADA SAAT AKAN
MENINGKATKAN KEPEMILIKAN SAHAM MENJADI LEBIH DARI 40%
(EMPAT PULUH PERSEN)**

No.	Dokumen *)
1	Surat Keterangan dari Otoritas Pengawasan Bank mengenai: a. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir; b. Hasil penilaian pemenuhan kewajiban modal minimum sesuai profil risiko posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir; c. Jumlah modal inti (<i>tier 1</i>) posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir
2	Surat Rekomendasi dari Otoritas Pengawas Perbankan (bagi PSP berupa lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri), paling kurang memuat : a. Keterangan mengenai PSP yaitu: 1) memiliki reputasi yang baik; 2) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan; dan b. Pernyataan bahwa Otoritas <i>home country</i> PSP akan mendukung kebijakan otoritas pengawas di tempat kedudukan Bank (<i>host country</i>) di bidang pengawasan yang antara lain bertujuan untuk memperbaiki kinerja Bank dan/atau memelihara stabilitas sistem keuangan di tempat kedudukan Bank (<i>host country</i>).
3	Surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki, paling kurang memuat: a. Kesediaan membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang dimiliki; b. Jumlah surat utang bersifat ekuitas yang akan dibeli.
4	Surat pernyataan untuk memiliki Bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu
5	Surat pernyataan untuk mendukung perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki, yang paling kurang memuat keterangan: a. Sektor ekonomi dan wilayah ekonomi yang akan menjadi prioritas; b. Rencana kegiatan terhadap pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.
6	Surat pernyataan bahwa Bank yang dimiliki, memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang bersifat ekuitas, paling kurang memuat: a. Bank akan menerbitkan surat utang bersifat ekuitas;

	b. Jumlah surat utang bersifat ekuitas yang akan diterbitkan; c. Surat utang bersifat ekuitas dimaksud wajib dikonversi menjadi saham apabila rasio KPMM berdasarkan profil risiko kurang dari ketentuan berlaku.
--	---

*) Disampaikan pada saat permohonan memiliki saham Bank sebesar lebih dari 40% dari modal Bank, kecuali angka 6 yang disampaikan paling lama 6 (bulan) setelah realisasi peningkatan jumlah kepemilikan saham menjadi lebih dari 40% (empat puluh persen).

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR